

---

## Analisis Standar Belanja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Pada Pemerintah Kota Sungai Penuh

oleh:

\*) Rina Widyanti

\*) Program Studi Magister Sains Akuntansi Universitas Andalas

### Abstrak

*Analysis of Expense Standards (ASB) is a guideline used to analyze the reasonableness of workload or cost of each activity undertaken by the Unit (SKPD) in one fiscal year. The purpose of this research is to develop ASB especially for activity provision of stationery (ATK). The data used in this research is secondary data obtained from the DPA-SKPD Sungai Penuh City government. The primary data of interviews with leaders and some of the staff as well as the relevant officials. Data analysis method used is a simple regression. Simple regression analysis is a method of forecasting which will predict the cost standards for ATK activities. This activity is affected by the triggering factors (cost drivers) is the amount of activity. The results of this study in the form of equations where the standard shopping ASB ATK influenced by the activity of providing fixed expenditure and expenditure variables. Shopping variable for this activity is influenced by the amount of activity. To create a model for the analysis of expenditure standard ATK activity is grouped into nine (9) functions of government services consisting of the economic service./unction, the function of health care, educational services, protective services, public services, tourism services and security, public services and housing facilities, service districts, and village services. Verify the reasonableness of calculations based on the formulation of the model ASB shopping on 9 functions of government services shows that the value of expenditure contained in each DPA SKPD can be approved based on the criteria of fairness shopping. However, there are obstacles in the processing of data in the form of data on some SKPDs DPA form the basis of ASB which included incomplete and the allocation of its budget is too high thus affecting the results of the formulation ASB. It is hoped that this study provides an overview to the team of local government budgets to increase performance budgeting in the future.*

**Keywords:** *Analysis of Expense Standards, Total Activity, Function Government Services*

### PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah dalam perkembangannya telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang tersebut membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Masalah pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang

---

utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah daerah (Mardiasmo: 1999). Untuk tercapainya anggaran daerah yang efisien dan efektif, maka Anggaran Daerah harus disusun dengan pendekatan kinerja. Dengan menggunakan Anggaran Kinerja tersebut, maka Anggaran Daerah akan lebih transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen yang diperlukan untuk menyusun Anggaran Daerah dengan pendekatan kinerja adalah Analisis Standar Belanja (ASB) (PSEKP: 2009). Analisis Standar Belanja itu sendiri merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan (Pasal 93 ayat 4 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006).

Hal penting yang harus dipahami terlebih dahulu adalah bahwa ASB tidak dimaksudkan untuk menentukan standar semua jenis belanja program dan kegiatan melainkan untuk belanja kegiatan yang memiliki karakteristik tertentu. Oleh sebab itu, perlu pemahaman terhadap setiap jenis kegiatan dan sifat belanja. Pemahaman tersebut didasarkan pada pengelompokan kegiatan dan konsep klasifikasi biaya (belanja). Besar kecilnya belanja untuk setiap kegiatan dipengaruhi oleh beberapa faktor pemicu (cost driver). Cost driver berbeda-beda sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan. Kemampuan mengelola faktor pemicu merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi. Pemerintah Kota Sungai Penuh dewasa ini dihadapkan pada persoalan dilematis dalam menjalankan tugas pokoknya. Di satu sisi mereka dihadapkan kepada perkembangan tugas pokok yang semakin kompleks, akibat dari semakin kompleksnya tuntutan masyarakat. Di sisi lain mereka juga dihadapkan kepada kelangkaan sumberdaya yang dimilikinya untuk menghadapi kompleksitas tersebut. Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok pemerintah daerah, peranan alat tulis kantor diperlukan dalam setiap operasional Pemerintah Daerah. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah secara rutin menganggarkan belanja untuk penyediaan alat tulis kantor untuk program dan kegiatan selama tahun anggaran. Anggaran belanja yang dialokasikan pada kegiatan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Disamping itu alokasi penentuan Anggaran Belanja sesuai ASB belum sepenuhnya diterapkan pada Pemerintah Kota Sungai Penuh khususnya untuk alokasi belanja kegiatan penyediaan alat tulis kantor.

---

## KAJIAN PUSTAKA

### **Keuangan Daerah**

Keuangan daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Mamesah, 1995: 16). Menurut Halim (2007), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari : " Keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam kekayaan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang investaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)".

### **Anggaran Berbasis Kinerja**

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, "kinerja" memiliki beberapa arti, seperti prestasi, tingkat capaian, realisasi dan pemenuhan. Kebanyakan terminologi mengacu pada dampak tujuan tindakan publik, tetapi beberapa berhubungan secara subyektif dengan tingkat kepuasan yang dirasakan sebagai suatu hasil dari suatu tindakan. Perlu dipahami bahwa konsep kinerja harus dianggap sebagai sebuah alat/instrumen untuk mencapai tujuan dan bersifat relatif atau dapat diperbandingkan baik terhadap waktu, terhadap daerah atau SKPD lain.

Anggaran dengan pendekatan prestasi kerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan hasil kerja dan output dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Setiap dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan harus didasarkan atas hasil dan output yang jelas dan terukur. Ini merupakan pembeda utama antara anggaran kinerja dengan anggaran tradisional yang pernah diterapkan sebelumnya yang lebih mempertanggung jawabkan input yang direncanakan dengan input yang dialokasikan.

### **Analisis Standar Belanja**

Menurut buku Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2005), Analisis Standar Belanja (ASB) adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau

---

---

kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 167 ayat 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan analisis standar belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang dianggarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran.

## **METODA PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Alasan peneliti memilih Kota tersebut sebagai lokasi penelitian ingin mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran untuk program dan kegiatan yang ada dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya untuk kegiatan penyediaan alat tulis kantor serta bagaimana perhitungan analisis standar belanja yang digunakan dalam setiap program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan sifat objek penelitian yang tengah berlangsung saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Karena penelitian ini bertujuan menentukan kebutuhan belanja yang wajar untuk setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan standar belanja, maka peneliti hanya mendeskriptifkan informasi yang sesuai dengan variabel yang diteliti.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Data Sekunder**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2011- 2013. Data ini bersumber dari seluruh SKPD yang ada di Pemerintah Kota Sungai Penuh.

- 
- b. Data primer, yang diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan dan beberapa staf serta pejabat terkait.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

- a. Field Research (Penelitian Lapangan)

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dengan mendatangi instansi-instansi yang terkait.

- b. Library Research (Penelitian Kepustakaan)

Data teoritis berasal dari literatur-literatur dan referensi-referensi yang relevan dengan masalah yang diteliti.

### **Metode Analisis**

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi sederhana. Metode ini digunakan untuk menentukan standar biaya untuk kegiatan penyediaan alat tulis kantor. Adapun analisis regresi sederhana yang digunakan dengan persamaan:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y = adalah belanja total suatu kegiatan

X = adalah nilai jumlah kegiatan (cost driver)

a = adalah nilai belanja temp kegiatan penyediaan alat tulis kantor

b = adalah nilai belanja variabel kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Sedangkan metode pengembangan Analisa Standar Belanja mengacu pada penyusunan ASB yang dikembangkan oleh Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) UGM yang bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Fedoman Teknis Penyusunan Analisis Standar Belanja oleh Abdul Hafiz Tanjung dan Suhairi.

### **PEMBAHASAN**

Penyediaan ATK merupakan kegiatan untuk dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasional organisasi, khususnya dalam bentuk kertas, tinta dan alat tulis kantor lainnya sehingga kegiatan rutin SKPD dapat dilaksanakan secara lancar. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Lampiran A. VII bahwa penyediaan alat tulis kantor termasuk kedalam program administrasi perkantoran. Selain kegiatan penyediaan alat tulis

---

---

kantor, yang termasuk ke dalam kelompok program administrasi perkantoran ini adalah kegiatan penyediaan surat menyurat, kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, kegiatan penyediaan logistik dan makanan minuman, serta kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi. Oleh karena penyediaan alat tulis kantor merupakan kegiatan yang di anggarkan untuk memenuhi kebutuhan rutin, maka. besar kecilnya belanja alat tulis kantor ini di pengaruhi oleh jumlah pegawai dan jumlah kegiatan, semakin banyak jumlah pegawai dan kegiatan semakin besar belanja ATK yang dibutuhkan. Faktor pemicu kebutuhan alat ulis kantor untuk semua SKPD adalah sama yaitu jumlah pegawai dan jumlah kegiatan, tetapi karena tupoksinya, maka besarnya kebutuhan untuk semua fungsi pelayanan SKPD tidaklah sama. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa kebutuhan ATK tidak sama untuk setiap SKPD karena kebutuhan terhadap ATK tersebut dipengaruhi oleh fungsi dari setiap SKPD, misalnya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang mempunyai fungsi pelayanan umum pemerintahan membutuhkan ATK lebih jauh banyak daripada SKPD Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang berfungsi dalam pelayanan keamanan. Oleh sebab itu, penentuan ASB untuk kegiatan penyediaan ATK ini dilakukan berdasarkan fungsi SKPD yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan pariwisata dan keamanan, pelayanan perumahan dan fasilitas umum, pelayanan ekonomi, pelayanan perlindungan, pelayanan pendidikan dan kecamatan (Anonymous, ASB Draft).

Untuk lebih jelasnya menurut fungsi SKPD pada Pemerintah Kota Sungai Penuh dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Pelayanan Kesehatan

SKPD yang termasuk dalam fungsi pelayanan kesehatan adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Instalasi Farmasi, termasuk Puskesmas.

b. Pelayanan Umum Daerah

SKPD yang termasuk dalam fungsi pelayanan umum pemerintah ini adalah Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah, dan Sekretariat DPRD.

c. Pelayanan Pariwisata Dan Keamanan

---

---

SKPD yang termasuk dalam fungsi pelayanan pariwisata dan keamanan ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

d. Pelayanan Perumahan Dan Fasilitas Umum

SKPD yang termasuk dalam fungsi pelayanan perumahan dan fasilitas umum ini adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi serta Dinas Pekerjaan Umum, Kantor Pengelolaan Pasar, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

e. Pelayanan Ekonomi

SKPD yang termasuk dalam fungsi pelayanan ekonomi ini adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi, Dinas Pertanian, Kantor Pelayanan Pangan dan Penyuluhan.

f. Pelayanan Perlindungan

SKPD yang termasuk dalam fungsi pelayanan perlindungan ini adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kantor Pemeberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kantor Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

g. Pelayanan Pendidikan

SKPD yang termasuk dalam fungsi pelayanan pendidikan ini adalah Dinas Pendidikan, UPTD yang berada di Lingkungan Pemerintah Sungai Penuh termasuk Sekolah.

h. Pelayanan Kecamatan

Yang termasuk dalam SKPD Kecamatan adalah seluruh Kantor Camat yang ada di Sungai Penuh.

**A. Penyusunan ASB Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Fungsi Pelayanan Ekonomi**

Deskripsi:

Penyediaan ATK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasional organisasi, khususnya dalam bentuk kertas, tinta, dan alat tulis kantor lainnya sehingga kegiatan rutin SKPD dapat dilaksanakan secara lancar.

---

**Pengendali belanja (cost driver):**

Jumlah Kegiatan.

**Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):**

= Rp. 14.5 10.000,00 per Kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):**

= Rp. 173.967,00 kali Jumlah Kegiatan

**Rumus Perhitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 14.5 10.000,00 + (Rp. 173.967,00 x Jumlah Kegiatan)

**Alokasi Obyek Belanja ASB 001 :**

<b>Objek Belanja</b>	<b>Batas Bawah</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>Batas Atas</b>
Belanja Habis Pakai	16.001.600	21.641.000	32.766.851

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh jumlah anggaran belanja dengan model ASB sebesar Rp. 21.990.581,-. Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata sebesar Rp. 21.641.000,-, dapat dikatakan bahwa anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD ini masih wajar. Hal ini disebabkan oleh nilai anggaran tersebut berada dibawah nilai rata-rata dari anggaran belanja model ASB. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis dengan model ASB ini, maka Dokumen Pelaksana Anggaran di atas dapat disetujui berdasarkan kriteria kewajaran belanja.

## **B. Penyusunan ASB Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Fungsi Pelayanan Kesehatan**

**Deskripsi:**

Penyediaan ATK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasional organisasi, khususnya dalam bentuk kertas, tinta, dan alat tulis kantor lainnya sehingga kegiatan rutin SKPD dapat dilaksanakan secara lancar.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah Kegiatan.

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 2.342.848,00 per Kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 398.638,00 kali Jumlah Kegiatan

**Rumus Perhitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 2.342.848,00 + (Rp. 398.638,00 x Jumlah Kegiatan)

**Alokasi Obyek Belanja ASB 001 :**

<b>Objek Belanja</b>	<b>Batas Bawah</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>Batas Atas</b>
Belanja Habis Pakai	2.724.900	12.575.000	49.252.800

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh jumlah anggaran belanja dengan model ASB sebesar Rp.14.301.988,-. Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata sebesar Rp.12.575.000,-, dapat dikatakan bahwa anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD ini masih wajar. Hal ini disebabkan oleh nilai anggaran tersebut di bawah dengan nilai rata-rata dari anggaran belanja model ASB. Jadi dapat disimpulkan analisis dengan model ASB ini, maka Dokumen Pelaksana Anggaran di atas dapat disetujui berdasarkan kriteria kewajaran belanja. Jadi dapat disimpulkan analisis dengan model ASB ini, maka Dokumen Pelaksana Anggaran di atas dapat disetujui berdasarkan kriteria kewajaran belanja.

### **C. Penyusunan ASB Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Fungsi Pelayanan Pendidikan**

**Deskripsi :**

Penyediaan ATK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasional organisasi, khususnya dalam bentuk kertas, tinta, dan alat tulis kantor lainnya sehingga kegiatan rutin SKPD dapat dilaksanakan secara lancar.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah Kegiatan.

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 2.342.848,00 per Kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 398.638,00 kali Jumlah Kegiatan

**Rumus Perhitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 2.342.848,00 + (Rp. 398.638,00 x Jumlah Kegiatan)

**Alokasi Obyek Belanja ASB 001 :**

<b>Objek Belanja</b>	<b>Batas Bawah</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>Batas Atas</b>
Belanja Habis Pakai	2.724.900	12.575.000	49.252.800

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh jumlah anggaran belanja dengan model ASB sebesar Rp.14.301.988,-. Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata sebesar Rp.12.575.000,-, dapat dikatakan bahwa anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD ini masih wajar. Hal ini disebabkan oleh nilai anggaran tersebut di bawah dengan nilai rata-rata dari anggaran belanja model ASB. Jadi dapat disimpulkan analisis dengan model ASB ini, maka Dokumen Pelaksana Anggaran di atas dapat disetujui berdasarkan kriteria kewajaran belanja. Jadi dapat disimpulkan analisis dengan model ASB ini, maka Dokumen Pelaksana Anggaran di atas dapat disetujui berdasarkan kriteria kewajaran belanja.

#### **D. Penyusunan ASB Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Fungsi Pelayanan Perlindungan**

**Deskripsi :**

Penyediaan ATK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasional organisasi, khususnya dalam bentuk kertas, tinta, dan alat tulis kantor lainnya sehingga kegiatan rutin SKPD dapat dilaksanakan secara lancar.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah Kegiatan

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 4.937.165,00 per Kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 643.314,00 kali Jumlah Kegiatan

**Rumus Perhitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 4.937.165,00 + (Rp. 643.314,00 x Jumlah Kegiatan)

**Alokasi Obyek Belanja ASB 001 :**

Objek Belanja	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas
Belanja Habis Pakai	10.961.000	24.380.000	42.015.115

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh jumlah anggaran belanja dengan model ASB sebesar Rp.28.739.783,-. Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata sebesar Rp.24.380.000,-, dapat dikatakan bahwa anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD ini masih wajar. Hal ini disebabkan oleh nilai anggaran tersebut berada pada nilai rata-rata dari anggaran belanja model ASB. Dapat disimpulkan bahwa Dokumen Pelaksana Anggaran di atas dapat disetujui berdasarkan kriteria kewajaran belanja.

**E. Penyusunan ASB Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Fungsi Pelayanan Umum****Deskripsi:**

Penyediaan ATK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasional organisasi, khususnya dalam bentuk kertas, tinta, dan alat tulis kantor lainnya sehingga kegiatan rutin SKPD dapat dilaksanakan secara lancar.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah Kegiatan.

**Satuan pengendali belanja tetap (*Fixed cost*):**

= Rp. 25.810.000,00 per Kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 438.322,00 kali Jumlah Kegiatan

**Rumus Perhitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 25.810.000,00 + (Rp. 438.322,00 x Jumlah Kegiatan)

**Alokasi Obyek Belanja ASB 001 :**

<b>Objek Belanja</b>	<b>Batas Bawah</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>Batas Atas</b>
Belanja Habis Pakai	16.093.773	45.377.000	91.753.600

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh jumlah anggaran belanja dengan model ASB sebesar Rp.39.397.982,-. Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata sebesar Rp.45.377.000,-, dapat dikatakan bahwa anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD ini masih wajar. Hal ini disebabkan oleh nilai anggaran tersebut berada di bawah nilai rata-rata dari anggaran belanja model ASB. Jadi dapat disimpulkan bahwa Dokumen Pelaksana Anggaran di atas dapat disetujui berdasarkan kriteria kewajaran belanja.

## **F. Penyusunan ASB Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Fungsi Pelayanan Pariwisata dan Keamanan**

**Deskripsi:**

Penyediaan ATK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasional organisasi, khususnya dalam bentuk kertas, tinta, dan alat tulis kantor lainnya sehingga kegiatan rutin SKPD dapat dilaksanakan secara lancar.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah Kegiatan.

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 16.020.000,00 per Kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 112.353,00 kali Jumlah Kegiatan

**Rumus Perhitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp16.020.000,00 + (Rp. 112.353,00 x Jumlah Kegiatan)

**Alokasi Obyek Belanja ASB 001 :**

<b>Objek Belanja</b>	<b>Batas Bawah</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>Batas Atas</b>
Belanja Habis Pakai	10.000.000	18.550.000	34.930.550

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh jumlah anggaran belanja dengan model ASB sebesar Rp.18.267.060,-. Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata sebesar Rp.18.550.000,-, dapat dikatakan bahwa anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD ini masih wajar. Hal ini disebabkan oleh nilai anggaran tersebut berada di bawah nilai rata-rata dari anggaran belanja model ASB. Dalam penyusunan analisis standar belanja pada fungsi pelayanan pariwisata dan keamanan berdasarkan data yang diolah tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai belanja yang diajukan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran masing-masing SKPD memenuhi kriteria kewajaran belanja.

## **G. Penyusunan ASB Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Fungsi Pelayanan Perumahan dan Fasilitas Umum**

**Deskripsi :**

Penyediaan ATK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasional organisasi, khususnya dalam bentuk kertas, tinta, dan alat tulis kantor lainnya sehingga kegiatan rutin SKPD dapat dilaksanakan secara lancar.

**Pengendali belanja (*cost driver*);**

Jumlah Kegiatan.

**Satuan pengendali belanja tetap (*Fixed cost*):**

= Rp. 42.830.000,00 per Kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 164.365,00 kali Jumlah Kegiatan

**Rumus Perhitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.42.830.000,00 + (Rp. 164.365,00 x Jumlah Kegiatan)

**Alokasi Obyek Belanja ASB 001 :**

<b>Objek Belanja</b>	<b>Batas Bawah</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>Batas Atas</b>
Belanja Habis Pakai	15.787.591	48.779.000	125.000.000

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh jumlah anggaran belanja dengan model ASB sebesar Rp.48.418.410,-. Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata sebesar Rp.48.779.000,-, dapat dikatakan bahwa anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD ini masih wajar. Hal ini disebabkan oleh nilai anggaran tersebut berada di bawah nilai rata-rata dari anggaran belanja model ASB. Dalam penyusunan analisis standar belanja pada fungsi pelayanan perumahan dan fasilitas umum yang diajukan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran masing-masing SKPD memenuhi kriteria kewajaran belanja.

## **H. Penyusunan ASB Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Fungsi Pelayanan Kecamatan**

**Deskripsi:**

Penyediaan ATK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasional organisasi, khususnya dalam bentuk kertas, tinta, dan alat tulis kantor lainnya sehingga kegiatan rutin SKPD dapat dilaksanakan secara lancar:

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah Kegiatan.

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 12.650.000,00 per Kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp: 114:078,00 kali Jumlah Kegiatan

**Rumus Perhitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.12.650.000,00 + (Rp. 114.078,00 x Jumlah Kegiatan)

**Alokasi Obyek Belanja ASB 001 :**

<b>Objek Belanja</b>	<b>Batas Bawah</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>Batas Atas</b>
Belanja Habis Pakai	10.011.150	15.624.000	23.119.450

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh jumlah anggaran belanja dengan model ASB sebesar Rp.15.501.950,-. Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata sebesar Rp.15.624.000,-, dapat dikatakan bahwa anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD ini masih wajar. Hal ini disebabkan oleh nilai anggaran tersebut berada di atas nilai rata-rata dari anggaran belanja model ASB. Dalam penyusunan analisis standar belanja pada fungsi pelayanan kecamatan yang diajukan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran masing-masing SKPD memenuhi kriteria kewajaran belanja.

## **I. Penyusunan ASB Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Fungsi Pelayanan Kelurahan**

**Deskripsi :**

Penyediaan ATK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasional organisasi, khususnya dalam bentuk kertas, tinta, dan alat tulis kantor lainnya sehingga kegiatan rutin SKPD dapat dilaksanakan secara lancar.

**Pengendali belanja (*cost driver*);**

Jumlah Kegiatan.

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp, 257.700,00 per Kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 233.400,00 kali Jumlah Kegiatan

**Rumus Perhitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp.257.700,00 + (Rp. 233.400,00 x Jumlah Kegiatan)

**Alokasi Obyek Belanja ASB 001 :**

<b>Objek Belanja</b>	<b>Batas Bawah</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>Batas Atas</b>
Belanja Habis Pakai	1.0520.500	3.894.400	5.502.500

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh jumlah anggaran belanja dengan model ASB sebesar Rp.3.291.900,-. Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata sebesar Rp.3.894.400,-, dapat dikatakan bahwa anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD ini masih wajar. Hal ini disebabkan oleh nilai anggaran tersebut berada pada nilai rata-rata dari anggaran belanja model ASB. Dalam penyusunan analisis standar belanja pada fungsi pelayanan kelurahan yang diajukan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran masing-masing SKPD memenuhi kriteria kewajaran belanja.

Secara keseluruhan hasil penilaian terhadap kewajaran nilai belanja untuk kegiatan penyediaan ATK pada 9 fungsi pokok pelayanan pemerintah menunjukkan nilai yang wajar sehingga anggaran yang tercantum dalam DPA tersebut dapat dinilai wajar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hamzah (2011) namun berbeda dalam hal penentuan jenis kegiatannya.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa dan menyusun ASB kegiatan penyediaan alat tulis kantor pada Pemerintah Kota Sungai Penuh. Dari penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk menyusun model analisis standar belanja kegiatan ATK ini di kelompokkan kedalam 9 (sembilan) fungsi pelayanan pemerintah yang terdiri dari fungsi pelayanan ekonomi, fungsi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan perlindungan,

---

pelayanan umum, pelayanan pariwisata dan keamanan, pelayanan fasilitas umum dan perumahan, pelayanan kecamatan, serta pelayanan kelurahan.

2. Dari hasil pengolahan data DPA masing-masing fungsi pelayanan, terdapat beberapa SKPD yang nilai alokasi anggaran belanjanya terlalu tinggi sehingga mempengaruhi hasil perumusan model ASB. Diantara SKPD tersebut adalah Dinas Kesehatan, dan Sekretariat Daerah. Oleh karena itu, nilai belanja tersebut tidak dimasukkan dalam pengolahan data. hal ini dimaksudkan agar hasil rumusan model ASB menjadi wajar, karena yang dinilai adalah kewajaran beban kerja bukan ketepatan belanja.
3. Perhitungan verifikasi kewajaran belanja berdasarkan rumusan model ASB pada 9 fungsi pelayanan pemerintah, menunjukkan bahwa nilai belanja yang tercantum pada masing-masing DPA SKPD dapat disetujui berdasarkan kriteria kewajaran belanja.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh dianjurkan untuk lebih memberikan perhatian terhadap kegunaan dan fungsi ASB ini sebagai dasar acuan bagi Tim Anggaran dalam menetapkan anggaran.
2. Perlu juga hendaknya memberikan sosialisasi serta mendorong kepada Kepala SKPD agar menggunakan ASB pada Perencanaan dan Penyusunan DPA-SKPD sehingga pada masa mendatang pemborosan anggaran dapat di minimalisir.
3. Karena keterbatasan penelitian ini, penulis mengharapkan pada penelitian berikutnya dapat menambah variabel lain untuk kesempurnaan penelitian ini.



#### DAFTAR PUSTAKA

Hafiz, Abdul Tanjung. 2010. Peranan dan Teknik Penyusunan Analisis Standar Belanja dalam Penyusunan APBD. Disampaikan Pada Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Biaya Kabupaten Pelalawan-Riau.

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.

Mamesah, D.J. 1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.

---

Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta.

PSEKP-UGM, APKASI, dan GTZASSD. 2009. Penyusunan Analisis Standar Belanja, Pengalaman Praktis di Pemerintah Daerah. Yogyakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 2004.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 2004.